# **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

# 2.1 Gambaran Umum Partai Hati Nurani Rakyat.

### 2.1.1 Sejarah Partai Hati Nurani Rakyat

Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006<sup>32</sup>.

- Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut.
  - Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
  - 2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
  - 3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Situs Resmi Partai Hati Nurani Rakyat www.hanura.com ,diakses pada tanggal 5 Mei 2015

- 4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
- 5. Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.6.
- 6. Kita kembangkan semangat perjuangan, 'Semua untuk satu, satu untuk semua'. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
- 7. Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.
- Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.
- Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA.
   Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta.
- Komposisi dewan pendiri Partai HANURA di antaranya adalah: Jend. TNI
   (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti

Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS., Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra dan lain-lain.

# 2.1.2 Program Kerja Bidang Kaderisasi Periode 2010-2015

# A. Prog<mark>ram Um</mark>um Bidang Kaderisasi.

Program Umum Partai Bidang Kaderisasi yang diamanahkan dalam MUNAS-I/2010 adalah Konsolidasi dan Revitalisasi Wawasan yang bertujuan memantapkan, memperluas dan memperdalam wawasan kader-kader Partai terhadap Partai HANURA sebagai kekuatan penggerak, pelopor dan perjuangan reformasi dan demokrasi di Indonesia Program ini juga ditunjukkan untuk membuka wawasan kader Partai HANURA sehingga memiliki kemampuan sebagai penyelesai masalah (*problem solvers*) yang inklusif dan senantiasa mampu mengutamakan kepentingan yang lebih besar dibanding dengan kepentingan yang sempat atau jangka pendek Program-program tersebut meliputi.<sup>33</sup>

 Pendidikan demokrasi dan kebangsaan serta pembinaan kader Partai HANURA agar memiliki pemahaman mendalam dan komitmen yang tinggi terhadap

.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Keputusan-keputusan Rapat Pimpinan Nasional I/2010 Partai Hati Nurani Rakyat

nilai-nilai universal demokrasi serta mampu menerapkannya dalam konteks ke Indonesia-an dan kerakyatan.

- 2. Pendidikan dan pembinaan kader berjenjang dalam rangka mewujudkan Partai HANURA sebagai pemilik sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas sehingga mampu menjadi pemecah/penyelesai masalah (*Problem Solvers*) yang dihadapi oleh bangsa dalam lingkungan yang berbeda-beda
- 3. Pendidikan dan pembinaan kader muda Partai HANURA agar memiliki wawasan demokrasi dan kebangsaan sehingga akan terwujud regenerasi kader Partai yang sistematik berkesinambungan
- 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus Partai.
  Organisasi Sayap (Orsap) dan Otonom, (Ortom) pada seluruh tingkatan melalui pola-pola rekrutmen yang sistematis dan pendidikan serta pelatihan berjenjang dan/atau berkesinambungan
- 5. Peningkatan kapasitas dan kualitas kader dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat, khususnya tataran akar rumput (*grass roots level*) melalui kursus, pelatihan, pendidikan, baik internal maupun eksternal Partai, dan kiprah pendampingan masyarakat.

# 2.1.3 Definisi dan Persyaratan Kaderisasi Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat . <sup>34</sup>

### AD ART BAB IV

### **KADER**

### Pasal 5

- 1. Kader Partai adalah anggota yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan kader dan dipersiapkan untuk mengemban jabatan struktural maupun jabatan di luar Partai yang merupakan pelaksanaan dari perjuangan dan misi Partai.
- 2. Anggota menjadi Kader Partai apabila telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader yang diadakan oleh Partai setelah disaring atas dasar kualitas:
  - a. Sikap mental ideologi.
  - b. Penghayatan terhadap doktrin ,visi ,misi , dan platform partai .
  - c. Kepemimpinan, militansi, dan kemandirian.
  - d. Prestasi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela.
- 3. Seseorang yang memiliki prestasi / jasa yang besar bagi Partai dapat ditetapkan sebagai Kader Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat .
- 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader Partai diatur dalam Peraturan Organisasi .

.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat

#### BAB VI

### PERSYARATAN KEPENGURUSAN

- 2.1 Persyaratan bagi anggota untuk dipilih menjadi Pengurus Partai :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia kepada Pancasila , UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
  - c. Memiliki Kartu Tanda Anggota.
  - d. Tidak menjadi Anggota Partai Politik lain
  - e. Memiliki kemampuan, loyalitas dan dedikasi kepada Partai.
  - f. Berijazah minimal SLTA atau sederajat bagi pimp<mark>in</mark>an Kepengurusan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai dengan Pimpinan Anak Cabang
  - g. Berdomisili di wilayah kerja kepengurusan masing masing.
  - h. Tidak tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan tetap dari pengadilan dan merugikan nama baik partai.
- 2.2 Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kepengurusan diatur dalam Peraturan Organisasi.

# 2.1.4 Sistem Perekrutan Calon Legislatif Hanura Pada Pemilu Tahun 2009

# A. Melalui Pendaftaran yang terbuka untuk Umum

Dalam hal ini Partai Hati Nurani Rakyat membuka pendaftaran calon legislatif yang sangat terbuka untuk umum , dimana dengan cara memasang papan pengumuman resmi pembukaan calon legislative pada dinding kantor DPP (untuk DPR RI), DPD (untuk DPRD Provinsi) dan DPC (untuk DPRD Kabupaten/Kota) , sehingga bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat bisa secara langsung mendatangi kantor – kantor tersebut sesuai dengan kebutuhan pendaftaran masing – masing . Pada papan pengumuman tersebut tentu saja tercantum syarat – syarat agar bisa menjadi calon legislatif Hati Nurani Rakyat diantaranya adalah setia pada Pancasila dan UUD 1945, menjadi anggota partai dan menerima AD/ART partai. Bersedia mengikuti pelatihan caleg. Mengisi formulir pendaftaran dan informasi lain termasuk biodata, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan lain-lain. 35

Selain itu, masyarakat bisa mengunjungi kantor-kantor Partai Hati Nurani Rakyat ,baik tingkat pusat hingga cabang maupun website <a href="www.hanura.com">www.hanura.com</a> untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran calon – calon legislatif tersebut . Pendaftaran secara umum biasanya resmi digelar enam bulan sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan .

<sup>35</sup> Situs Resmi Partai Hati Nurani Rakyat <u>www.hanura.com</u> ditambah dengan wawancara kepada ketua DPC Hanura Sampang

### B. Seleksi Secara Internal

Setelah melewati mekanisme seleksi secara terbuka dan go Public , maka internal Partai Politik Harti Nurani Rakyat juga mengadakan seleksi secara internal , yakni dengan cara mengumpulkan seluruh kandidat calon legislatif perempuan yang sudah mendaftar sejak enam bulan sebelum hari pelaksanaan Pemilu . Mereka dikumpulkan seluruhnya , kemudian mereka harus mempresentasikan visi misi dan program – programnya sebagai calon legislatif . Selain itu para pendaftar harus juga mempresentasikan bagaimana ia akan memenangkan suara pemilu calon legislatif , dengan kata lain para kandidat calon legislative harus mempresentasikan strategi strategi yang ditempuh untuk kemenangan dirinya saat pemilu legislatif nanti . Disamping itu para kandidat juga harus bisa meyakinkan lewat para penguji lewat presentasi nya bahwa ia adalah sosok yang loyal kepada Partai dan memiliki idealisme tinggi untuk selalu mengabdi kepada Partai yang diusungnya sekarang . Panitia seleksi dilakukan oleh para pengurus DPP,DPD ,DPC itu sendiri atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat. <sup>36</sup>

### 2.1.5 Kriteria Calon Legislatif Partai Hati Nurani Rakyat

Dalam hal ini Partai Hati Nurani Rakyat menggunakan aturan <u>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</u>, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tepatnya Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

<sup>36</sup> Situs Resmi Partai Hati Nurani Rakyat <u>www.hanura.com</u> ditambah dengan wawancara kepada ketua DPC Hanura Sampang

Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- 1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
- 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasa aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
   Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.8.
- 8. Sehat jasmani dan rohani.
- 9. Terdaftar sebagai pemilih.
- 10.Bersedia bekerja penuh waktu.
- 11.Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- 12.Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13.Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- 14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- 15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan,
- 16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

# 2.2 Gambaran Umum Dewan Pimpinan Cabang

2.2.1 Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Hati Nurani Rakyat Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 dan 2014.

Lima Partai Politik peserta Pemilu diantaranya PKB, Gerindra, PPP, Demokrat dan Hanura, mendominasi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sampang pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April lalu. Hal terlihat dalam hasil rekapitulasi manual suara secara keseluruhan yang dilakukan oleh KPU setempat.

Divisi Logistik KPUD Sampang Hernandi Kusuma Hadi mengatakan, dalam hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) medapat 8 kursi, disusul oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) sebanyak 7 kursi, kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP ) sebanyak 7 kursi, Partai Demokrat mendapatkan 6 kursi dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh 4 kursi.

Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Sampang dinominasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) yakni sebanyak 14.163 suara, disusul Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 11.947 suara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP ) Sebanyak 15.825 suara, Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 3.473 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 2.473 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 16.622 suara, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 1.988 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sebanyak 1.755 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) 1.761 suara, "partai Demokrat 12.177 suara, serta Partai Golongan Karya Golkar memperoleh 1.234 suara dan di posisi terendah diduduki Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI 57 suara. Jumlah suara sah adalah 83.485, jumlah suara tidak sah adalah sekitar 2.038 suara.

Suara tersebut berasal dari 14 desa se-Kecamatan Camplong meliputi Desa Taddan, Desa Tolelah, Desa Tambaan, Desa Prajjan, Desa Camplong, Desa Konang, Desa Sejati Tanjung, Desa Rabesan, Desa Tabulu, Desa Angersek, Desa Madupat, Desa Pamolan, Desa Palampaan.

Tabel 1.1 Perolehan Suara , Presentase dan Perolehan Kursi Pemilihan

Umum Legislative 2009, Kabupaten Sampang. 37

Nama Partai Politik	Hasil Perolehan suara	Present ase	Kursi
Partai Hanura	2.030 suara	4,5 %	1
Partai Karya Peduli Bangsa	200 suara	0,09 %	-
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	55 suara	0,02 %	-
Partai Peduli Rakyat Nasional	173 suara	0,07 %	-
Partai Ge <mark>rindra</mark>	3.767 suara	5,1 %	1
Partai Barisan Nasional	55 suara	0,02 %	-
Partai Keadian dan Persatuan Indonesia	42 suara	0,01 %	-
Parta <mark>i Keadila</mark> n Sejahtera	1.434 suara	3,2 %	-
Partai <mark>Amanat N</mark> asional	1.005 suara	2,7%	-
Partai Ind <mark>onesia Baru</mark>	55 suara	0,02%	-
Partai Kedaulatan	0 suara	-	-
Partai Persatuan Daerah	0 suara	-	-
Partai Kebangkitan Bangsa	14.454 suara	19.00%	4
Partai Pemuda Indonesia	0 suara	-	-
Partai Nasional Indonesia Marhaenis	0 suara	-	-
		1	

 $<sup>^{\</sup>rm 37}$  Madura corner.com, 31 Agustus 2009 , diakses pada tanggal 15 Desember 2014

250 suara	0,14 %	-
0 suara	-	-
0 suara	-	-
2 suara	0,0001	-
5 suara	0,0003	-
2 suara	0,0001	-
50 suara	0,01	-
4.090 suara	9.00%	2
22.250 suara	26,00%	5
0 suara	-	-
55 suara	0,02%	-
17.788 suara	23,00%	4
3.450 suara	5,3 %	1
2.037 suara	4,6%	1
173 suara	0,07 %	-
5.434 suara	8,1%	2
	0 suara  0 suara  2 suara  5 suara  2 suara  4.090 suara  22.250 suara  0 suara  17.788 suara  17.788 suara  2.037 suara	0 suara       -         0 suara       -         2 suara       0,0001 %         5 suara       0,0003 %         50 suara       0,01         4.090 suara       9.00%         22.250 suara       26,00%         0 suara       -         55 suara       0,02%         17.788 suara       23,00%         3.450 suara       5,3 %         2.037 suara       4,6%

Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0 suara	-	-
Partai Indonesia Sejahtera	0 suara	-	-
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	24.100 suara	27.50%	7
Partai Merdeka	0 suara	-	-
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	4.002 suara	8,7%	2
Partai Sy <mark>arikat Indo</mark> nesia	0 sua <mark>ra</mark>	-	-
Partai Buruh	0 suara	-	-

Tabel 1.2 Perolehan Suara , Presentase dan Perolehan Kursi Pemilihan

Umum Legislative 2014, Kabupaten Sampang. 38

Nama Partai Politik	Hasil Perolehan Suara	Presentase	Jumlah Kursi
Partai Nasional Demokrat	1 998 suara	2,4%	-
Partai Kebangkitan Bangsa	16 622 suara	19,9%	8
Partai Keadilan Sejahtera	1 755 suara	2,10%	-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2 473 suara	3.00%	-
Partai Golongan Karya	1 23 <mark>4 sua</mark> ra	1,5 %	-
Partai Gerakan Indonesia Raya .	14 163 suara	17.00%	7
Partai Demokrat	12 177 suara	15.00%	6
Partai Amanat Nasional	1 761 suara	2,11 %	-
Partai Persatuan Pembangunan	15 825 suara	19.00%	7
Partai Hati Nurani Rakyat	11 947 suara	14,31%	4
Partai Bulan Bintang	3 473 suara	4,16%	-
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	57 suara	0,07%	-

 $<sup>^{38}</sup>$  Madura corner.com, Rabu 30 April 2014 , diakses pada tanggal 22 Desember 2014

# 2.2.2 Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani

# Rakyat Kabupaten Sampang Masa Bakti 2009-2014 39

Ketua : Drs. H. MOH. MARSUKI, M.Si

Wakil Ketua : H. S U M A R

Wakil Ketua : TAUFIQURRAHMAN, SAB.

Wakil Ketua : H. MUSAMAN

Wakil Ketua : H. AHM. BBUSTAMI Wakil Ketua : ILHAM WAHYUDI

Wakil Ketua : H. HUSEN NAWANI, S.Ag.

Wakil Ketua : H. SUBRONTO
Wakil Ketua : MUH. SYAFIIH, SH
Wakil Ketua : ACHMAD SYAHFI'I

Wakil ketua : Hj. SUKIDAH

Wakil Ket<mark>ua : SU</mark>DARMADJI, S.Pd

Wakil Ketua : ACH. ZAHRI Wakil Ketua : Hj. SUBAIDAH

### **Sekretaris**: ALWI MULACHELA

Wakil Sekretaris : MOH. MUNI, S.Pd Wakil Sekretaris : MULYADI, S.Pd Wakil Sekretaris : SUPANDI, S.Pd Wakil Sekretaris : R. FATIMAH

Wakil Sekretaris : ISTINA

Wakil Sekretaris : NORA IMANIYAH

### Bendahara: H. ASHIM SHOFWAN M.

Wakil Bendahara : MATRAI

Wakil Bendahara : SITI NURAISIYAH

Wakil Bendahara : BUDIYANTO
Wakil Bendahara : ROGAYYAH
Wakil Bendahara : NUR FARIDA
Wakil Bendahara : IDA YULIASTUTI

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurai Rakyat Provinsi Jawa Timur Nomor SKEP/R.075/DPD.JTM/HANURA/IX/2012

# 2.2.1. Susunan Pengurus Divisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani

Rakyat ,Kabupaten Sampang Masa Bakti 2009 – 2014 40.

1. Bagian Organisasi dan Keanggotaan

Ketua : RUSFI Sekretaris : RODIMEN Anggota : INSRIATI

2. Bagian Kaderisasi

Ketua : ABDUL MAALI

Sekretaris: DJAMAL

Anggota : MUTMAINNAH

3. Bagian Pemenangan Pemilu

Ketua : MUHALI, SHI, MH

Sekretaris: HENDRA

4. Bagian Pemerintahan dan Hukum

Ketua : MAHUR Sekretaris : MOH. HUDI

5. Bagian Ekonomi dan Keuangan

Ketua : DJUMALI, BE Sekretaris : HERMANTO

6. Bagian Pembangunan

Ketua : HOLIZIL MUCHLIS Sekretaris : YUDI IRAWAN

7. Bagian Pendidikan dan Kesehatan

Ketua : SUGIYANTO

Sekretaris : MUZAIRI ADYS, BA

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurai Rakyat Provinsi Jawa Timur Nomor SKEP/R.075/DPD.JTM/HANURA/IX/2012

# 2.2.4 Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani

# Rakyat Kabupaten Sampang Masa Bakti 2010-2015<sup>41</sup>

### Ketua: Drs. H. MOH. MARSUKI, M.Si

Wakil Ketua : H. S U M A R

Wakil Ketua : TAUFIQURRAHMAN, SAB.

Wakil Ketua : H. MUSAMAN

Wakil Ketua : H. AHM. BBUSTAMI Wakil Ketua : ILHAM WAHYUDI

Wakil Ketua : H. HUSEN NAWANI, S.Ag.

Wakil Ketua : H. SUBRONTO
Wakil Ketua : MUH. SYAFIIH, SH
Wakil Ketua : ACHMAD SYAHFI'I

Wakil ketua : Hj. SUKIDAH

Wakil Ketua: SUDARMADJI, S.Pd

Wakil Ketua : ACH. ZAHRI Wakil Ketua : Hj. SUBAIDAH

### **Sekretaris: ALWI MULACHELA**

Wakil Sekretaris : MOH. MUNI, S.Pd
Wakil Sekretaris : MULYADI, S.Pd
Wakil Sekretaris : SUPANDI, S.Pd
Wakil Sekretaris : R. FATIMAH

Wakil Sekretaris : ISTINA

Wakil Sekretaris : NORA IMANIYAH

# Bendahara : H. ASHIM SHOFWAN M.

Wakil Bendahara : MATRAI

Wakil Bendahara : SITI NURAISIYAH
Wakil Bendahara : BUDIYANTO
Wakil Bendahara : ROGAYYAH
Wakil Bendahara : NUR FARIDA

Wakil Bendahara : IDA YULIASTUTI

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurai Rakyat Provinsi Jawa Timur Nomor SKEP/R.075/DPD.JTM/HANURA/IX/2012

# 2.2.5 Susunan Pengurus Divisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani

# Rakyat ,Kabupaten Sampang Masa Bakti 2010 – 2015<sup>42</sup>

# 1. Bagian Organisasi dan Keanggotaan

Ketua : RUSFI Sekretaris : RODIMEN Anggota : INSRIATI

### 2. Bagian Kaderisasi

Ketua : ABDUL MAALI

Sekretaris : DJAMAL

Anggota : MUTMAINNAH

# 3. Bagian Pemenangan Pemilu

Ketua : MUHALI, SHI, MH

Sekretaris : HENDRA

# 4. Bagian Pemerintahan dan Hukum

Ketua : MAHUR Sekretaris : MOH. HUDI

# 5. Bagian Ekonomi dan Keuangan

Ketua : DJUMALI, BE Sekretaris : HERMANTO

### 6. Bagian Pembangunan

Ketua : HOLIZIL MUCHLIS Sekretaris : YUDI IRAWAN

# 7. Bagian Pendidikan dan Kesehatan

Ketua : SUGIYANTO

Sekretaris : MUZAIRI ADYS, BA

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurai Rakyat Provinsi Jawa Timur Nomor SKEP/R.075/DPD.JTM/HANURA/IX/2012

# 2.2.6 Profil Calon – Calon Legislativ Perempuan, Sampang

Tabel 1.3 Profil Calon – Calon legislatif Perempuan yang berhasil diwawancarai.  $^{43}$ 

Nama &Tanggal Lahir Caleg	Asal Dapil	Kab/Kota /Kecamatan ) Tempat Tinggal Calon	Pekerjaan	Motivasi menjadi Caleg Partai Hanura
Henny Widiastuti S.T 31-01-1974	Dapil 1	Sampang , Sampang . Kelurahan Karang Dalam	Membantu usaha kontraktor milik suaminya	Permintaan ayahnya yang berperan sebagai salah satu wakil DPC Hanura Sampang
Aisyatur Rodiyah . 05-07-1981.	Dapil 2	Omben , Sampang . Desa Tanggumung	Ibu Rumah Tangga	Permintaan suami adalah salah satu sekretaris Hanura
Siti Mutammamah 06-02-1974	Dapil 3	Sampang, Sampang . Desa Tanggumung .	Ibu Rumah Tangga	Ajakan dari salah satu anggota Hanura
Hj.Siti Rofiah 5-10-1957	Dapil 4	Omben , Sampang , Desa Diyaan .	Ibu Rumah Tangga	Ajakan dari salah satu anggota Hanura
Musrifah . 5-06-1957	Dapil 5	Omben , Sampang . Desa Tanggumung .	Ibu Rumah Tangga	Permintaan dari suami yang berperan sebagai salah satu bendahara DPC Sampang .

 $<sup>^{\</sup>rm 43}$  Daftar Clehg Hanura TH.2014 Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sampang

### 2.2.7 Elit Politik dan Kebudayaan Perempuan Sampang

# A. Posisi Perempuan Dalam Konstruksi Sosial

Masyarakat Sampang dikenal sebagai masyarakat yang sangat mematuhi syari'ah Islam atau ajaran – ajaran agama Islam . Oleh karena itu Ajaran agama Islam mempengaruhi unsur – unsur yang ada di masyarakat Sampang itu sendiri . Pertama ,Islam menjadi unsur penanda identitas etnik di Kabupaten Sampang , meskipun sebenarnya tidak seluruh masyarakat Sampang memeluk agama Islam . Kedua , Islam berfungsi sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya realitas – realitas tersebut , maka tidak mengherankan bahwasanya budaya – budaya yang berkembang pada masyarakat Sampang merupakan representasi dari nilai – nilai Islam .

Hingga saat ini, salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato*, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang hingga saat ini.<sup>44</sup>

Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama hares dihormati. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan *privilige* di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Yusuf Pambudi , Mohammad , P*erempuan dan politik Srtudi tentang Aksesbilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang* . Fisip 2012 .

ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender<sup>45</sup>.

Dengan kata lain. budaya patriarki adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-lak'i clan perempuan. Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang hares dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Hal ini timbul dari adanya kepercayaan terhadap Tuhan dalam suatu agama, dan kemudian muncul kesan yang telah terpatri dalam alam bawah sadar masyarakat bahwa Tuhan adalah laki-laki. 46

Sedangkan penempatan *bhabhu'* (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di atas. Namun demikian, orang Sampang mengkonstruksi struktur (*structured structure*) yang berkembang sehingga kaum perempuan Sampang memiliki nilai khusus dalam masyarakat dan kebudayaan Sampang. Nilai khusus tersebut berwujud adanya perhatian yang lebih kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Perhatian yang khusus

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Idi Subandi dan Hanif Suranto. "Sebuah Pengantar" dalam *Wanita dan Media* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1998) hlm. LIV

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Mohammad Yusuf Pambudi , Perempuan dan politik Srtudi tentang Aksesbilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang . Fisip 2012 .

tersebut dapat dilihat pada unsur-unsur kebudayaan Sampang, seperti struktur kewarisan.<sup>47</sup>

Demikian juga dalam harta pewarisan harta keluarga. Sekalipun orang Sampang beragama Islam, aturan pewarisan mengikuti sistem adat setempat. Harta warisan dibagi ketika orang tua masih hidup. Pada umumnya, perempuan akan memperoleh bagian lebih besar daripada laki-laki. Harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan, umumnya, diberikan kepada perempuan dan tidak boleh dijual kepada siapapun. Sedangkan tanah ladang (teghalan) diberikan kepada anak laki-laki dan boleh dijual kepada orang lain. Dalam hat pembagian warisan ini, jarang sekali laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak. Bagian anak perempuan ini lebih banyak karena perempuan akan menjadi tempat berpulang bagi saudara laki-lakinya jika terjadi perceraian atau kasus lainnya. 48

Posisi perempuan yang demikian menjadikan masyarakat Madura sangat menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dalam pandangan orang Madura, perempuan, terutama istri, merupakan simbol kehormatan rumah tangga atau lakilaki Madura. Gangguan terhadap istri atau perempuan ditafsirkan sebagai pelecehan harga diri orang Madura. Kasus inilah yang sangat potensial mengarah pada terjadinya *carok*. 49

Dari paparan – paparan diatas , dapat disimpulkan bahwasanya kaum perempuan merupakan kaum yang dilindungi , dihormati , dan dimuliakan di

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Mohammad Yusuf Pambudi , Perempuan dan politik Srtudi tentang Aksesbilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang . Fisip 2012 .

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Mohammad Yusuf Pambudi, Perempuan dan politik Srtudi tentang Aksesbilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang. Fisip 2012.

<sup>49</sup> Pembahasan Jebih mendatai bentang carabi libat di Jamaharan (Maria).

<sup>19</sup> Pembahasan lebih mendetail tentang carok, lihat Adurrahman, "Masalah Carok di Madura", dalam Madura III (Kumpulan Makalah-makalah Seminar Tahun 1979), (Jakarta: Departemen P dan K, 1979), hlm. 42-56.

kehidupan sosial masyarakat . Akan tetapi di sisi lain perempuan tetap saja ditempatkan di ranah domestik . Karena ranah domestik itulah , akses – akses untuk go public tidak dimiliki oleh kaum perempuan Sampang . Di samping itu , karena adanya pengondisian – pengondisian tertentu seperti kuatnya dominasi dan hegemoni lelaki yang didukung oleh pembenaran maupun legitimasi lewat sistem budaya dan pemahaman agama , secara tidak langsung dapat menumbangkan kesadaran perempuan Sampang itu sendiri untuk berkecimpung di dunia politik , dimana di dunia politik menuntut seseorang untuk senantiasa aktif di lapangan kemasyarakatan .

### B. Adanya Nyai sebagai Elit Perempuan di Dunia Politik.

Homogenitas masyarakat Sampang khususnya perempuan yang mayoritas memeluk agama Islam telah memunculkan sosok cut perempuan yang biasa disebut Nyal. Di Sampang terdapat relasi patronase antara Nyai dan para perempuannya, baik yang hidup di lingkungan pesantren maupun masyarakat umum. Hubungan patronase antara para perempuan di Sampang dengan para Nyai dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan ketergantungan para perempuan terhadap para Nyai. Ada empat kategori Nyai : Nyai Kompolan, Nyai Pesantren, Nyai Panggung dan Nyai Politik. Eksistensi dan peran Nyai ditopang dengan modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, serta modal politik yang dimiliki para Nyai. Oleh para Nyai, Modal ini senantiasa diproduksi, diperbaharui, direproduksi, melalui media dakwah pendidikan, organisasi sosial keagamaan, lembaga politik serta pesantren yang berkembang pesat di Sampang. Sementara, meskip<mark>un keemp</mark>at kategori Nyai memiliki beberapa kesa<mark>m</mark>aan, namun mereka memiliki perbedaan motif antara Nyai yang satu dengan Nyai yang lainnya. Nyai Kompolan dan Nyai Pesantren lebih berorientasi pada pengabdian, pengetahuan dan pemberdayaan perempuan. Sedangkan Nyai Panggung memiliki tujuan yang lebih luas, dengan motif ekonomi dan pengetahuan. Dan Nyai Politik, lebih berorientasi mensukseskan proyek-proyek dan undang-undang yang lebih bersifat pragmatis dalam ekonomi. Dalam hubungan patronase ini, antara Nyai dan para perempuan di Sampang sama-sama memperoleh keuntungan walaupun masih diwarnai unsur bordinatif, subordinatif, meski terdapat upaya pemberdayaan.<sup>50</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Mohammad Yusuf pambudi Perempuan dan politik Srtudi tentang Aksesbilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang . 2012. Fisip

Hubungan patronase antara Nyai dengan para perempuan di Sampang. apapun motivasi pribadi para Nyai, pada intinya bermaksud memberdayakan perempuan Sampang. Kuatnya pengaruh Nyai terhadap upaya pemberdayaan perempuan disana di topang oleh empat modal, yakni : 1. Modal simbolik, dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang sifatnya given dan berakibat pada prestise dan kemashuran yang di peroleh dari keluarga atau nama yang di sandang para Nyai. 2. Modal kultural berkaitan dengan kedalaman pengetahuan (intelektualitas) memperoleh para Nyai. cara dan menstransfermasikannya. Intelektualitas para Nyai tidak ditentukan oleh perolehan ijazah pendidikan, tetapi berkait dengan pendidikan charakter building yang di dalami para Nyai, di peroleh dari keluarga dan pesantrennya. 3. Modal ekon<mark>omi beru</mark>pa perjuangan para Nyai dalam bekerja dan memperoleh harta juga berupa harta yang di wariskan kepada para Nyai berupa pesantren dan tanah yang bisa untuk membangun suatu lembaga. 4. Modal politik berkait dengan peluang para Nyai untuk melakukan peran politik.<sup>51</sup>

Dalam konteks ini kehadiran Nyai seringkali memberikan ilustrasi penghargaan kepada masyarakat dalam aktivitas yang dilaksanakan secara bersamasama. Pada aktivitas tersebut, perempuan dan nyai telah terjadi hubungan yang intensif dan luas dalam relasi sosial kemasyarakatan. Relasi ini menempatkan Nyai sebagai bagian penting dalam relasi kuasa dan kekuasaan antar perempuan pada masyarakat tradisional. Seiring dengan otonomi daerah yang menempatkan Nyai pada level puncak dalam struktur sosial, tidak bisa

-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Mohammad Yusuf Pambudi , Perempuan dan politik Srtudi tentang Aksesbilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang . 2012. Fisip

dipungkiri akan berpengaruh pada relasi kuasa dan kekuasaan selalu melingkupi aktivitas perempuan pedesaan. Relasi ini menggiring kekerabatan menjadi relasi kekuasaan antar elit masyarakat Sampang . Di samping itu pilihan politik orang Madura juga didasarkan dimensi agama yaitu pada partai Islam, baik itu pada masa Orde Baru atau sesudahnya. Beberapa hal tersebut semakin menguatkan bahwa kehadiran elit agama mempunyai posisi penting. <sup>52</sup>

### C. Informal Leader di Madura.

Selama ini, sebagian besar para akademisi selalu berangggapan bahwa para kiai atau tokoh agamalah yang memiliki pengaruh dominan sebagai *informal leader* di Madura. Akan tetapi fakta – fakta baru telah ditemukan , bahwasanya dalam konteks kajian akademis — meskipun bagi orang Madura sendiri bukan hal yang baru — bahwa tidak hanya kial yang menjadi bagian penting bagi elite masyarakat pedesaan, *informal leader* yang signifikari, tapi juga para blater. Blater adalah elite pedesaan yang memiliki *social origin* dan tradisi yang berbeda dengan kuitur kiai. Bila kiai dibesarkan di dalam kultur keagamaan, sedangkan blater dibesarkan dalam kultur jagoanisme, dekat dengan ritus kekerasan. Bila kiai dekat dengan tradisi tahlilan dan pengajian maka blater dengan dengan tradisi sandur, remoh dan kerapan sapi. <sup>53</sup>

Komunitas blater sudah menjadi fakta sosial *(social fact)* yang tidak dapat dibantah. Sekalipun Islam mendominasi percaturan sosial politik, ekonomi dan budaya di Madura, tetapi dalam perkembangan Islam di masyarakat kenyataannya

<sup>53</sup> Abdur Rozaki, Social Origin Politik Kuasa Blater di Madura, 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Mohammad Yusuf Pambudi, Perempuan dan politik Srtudi tentang Aksesbilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang . 2012. Fisip

tidak saja melahirkan elite kiai semata, namun tumbuh kultur lain yang selalu beririsan antara dialektika Islam dan adat atau kebiasaan lokal yang embrionya tumbuh sebelum Islam populer di Madura. Tradisi carok dan kerapan sapi embrionya sebenarnya berasal dan kultur adat atau tradisi lokal Madura. <sup>54</sup>

Melihat perkembangan sosial budaya peran kiai dan blater ini menarik untuk terus dicermati. Bila kiai di masa Lalu sebatas menjadi elite di masyarakat pedesaan, untuk konteks Madura pasca reformasi, kini kiai juga menjadi bagian penting dan elite perkotaan karena posisi kekuasaan formal yang kini disandangnya. Banyak kiai yang duduk di jabatan formal, baik sebagai bupati dan anggota dewan. Jadi dalam perkembangan sekarang ada dua pilar kiai, yakni mereka yang benar-benar murni sebagal *informal leader*. Meminjam istilah terbaru Gus Dur, yakni kiai kampung. Kiai kampung adalah kiai yang sangat dekat dengan aktifitas keseharian rakyat, jauh dari politik kekuasaan. Sedangkan kiai politik menempel di kekuasaan. Peran kiai politik sebagai *informal leader* bergeser menjadi pemimpin formal *(formal leader)*. Kiai kampung konsisten berada di jalur kultural sedangkan kiai politik berada di jalur struktural. Perkembangan ini sebenarnya sesuatu yang wajar saja dalam alam berdemokrasi. 55

Kaum blater masih dominan di posisi sebagai elite pedesaan, belum merangkak secara cepat Iayaknya kiai yang begitu eksis dan tampil dominan sebagai elite perkotaan. Blater sebagai orang kuat di desa masih tampil cukup dominan. Di pedesaan, komunitas blater masih memainkan peran sebagai broker

-

<sup>54</sup> Abdur Rozaki , Social Origin Politik Kuasa Blater di Madura , 2006 .

<sup>55</sup> Abdur Rozaki, Social Origin Politik Kuasa Blater di Madura , 2006 .

keamanan dalam interaksi ekonomi dan sosial politik. Selain itu tak sedikit yang bemain di dua kaki, selain sebagai broker keamanan juga sebagal tokoh formal, yakni menjadi *state apparatus* dengan cara menjadi *kiebun* (kepala desa). Di banyak tempat di pedesaan Madura, tak sedikit klebun desa berasal dan komunitas blater atau dipegaruhi oleh politik perblateran.<sup>56</sup>



56 Abdur Rozaki, Social Origin Politik Kuasa Blater di Madura , 2006 .